



Diversity UIKA Bogor
E-ISSN: 2776-9798

Diversity
JURNAL ILMIAH PASCASARJANA

<http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/diversity>

Determinasi Tenaga Kerja di Jawa Timur Tahun 2018-2022

*Matheus Ricardo Cahyo Widodo^a, Ananda Putri Pamungkas^b, Vernanda Caesarani^c, Fildjah Najibah Ghaisani^d, Renea Shinta Aminda^e, Maria Bernadette Nani Ariani^f**

abcdef Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

** Corresponding author e-mail: 2110115004@mahasiswa.upnvj.ac.id*

DOI: 10.32832/djip-uika.v14i2.15819

ABSTRAK

Permasalahan ketenagakerjaan muncul akibat tidak konsistennya sistem pencarian kerja. Banyak warga yang sudah merasakan dampak dari bertambahnya jumlah pekerja. Dengan mengukur tingkat penyerapan suatu wilayah, maka dapat diketahui berapa banyak tenaga kerja yang telah mendapatkan pekerjaan dan sedang bekerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan juga menganalisis dampak indeks pembangunan manusia (IPM), produk domestik bruto (PDRB) dan upah di Jawa Timur terhadap determinasi angkatan kerja pada periode 2018-2023. Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan teknik data menggunakan metode statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai IPM yang tinggi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, selain itu upah yang tinggi juga memberikan efek positif terhadap aktivitas tenaga kerja, dan jika PDB terus meningkat maka membuka peluang terjadinya penyerapan tenaga kerja.

Kata Kunci: Penyerapan Tenaga Kerja; Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Upah; Produk Domestik Bruto (PDB)

Determinants of Labor in East Java Year 2018-2022

ABSTRACT

Employment problems arise due to inconsistent job search systems. Many residents are already feeling the impact of the increasing number of workers. By measuring the absorption rate of an area, it can be known how many workers have found work and are working. The purpose of this study is to describe and also analyze the impact of the human development index (HDI), gross domestic product (GRDP) and wages in East Java on the determination of the labor force in the 2018-2023 period. The research data collection techniques used are literature studies and data techniques using descriptive statistical methods. The results of this study show that a high HDI value will increase employment, besides that high wages also have a positive effect on labor activity, and if GDP continues to increase, it opens up opportunities for employment.

Keywords: Employment; Human Development Index (HDI); Wages; Gross Domestic Product (GDP)

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Permasalahan ketenagakerjaan muncul akibat tidak konsistennya sistem pencarian kerja. Pada saat yang sama, masalah ketenagakerjaan sangat penting dalam pembangunan negara. Ketenagakerjaan sangat penting dalam kehidupan setiap orang karena mempunyai dimensi sosial dan ekonomi. Ketika pendapatan per kapita seseorang meningkat, maka struktur ekonomi pun berkembang pesat. Saat ini banyak penduduk yang sudah merasakan dampak terhadap meningkatnya jumlah tenaga kerja yang semakin hari semakin membesar. Hal ini menyebabkan jumlah individu yang sedang mencari kerja maupun yang sedang menjadi pengangguran akan semakin bertambah. Untuk dapat mencapai kondisi yang cukup merata, sangat diharapkan seseorang dapat bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.

Pertumbuhan penduduk Indonesia disebabkan karena Indonesia merupakan salah satu negara yang pertumbuhan penduduknya sangat cepat dibandingkan dengan negara lain. Dan pada faktanya, hal tersebut terbukti dalam dunia kerja. Tingkat kesempatan kerja yang dibutuhkan di Indonesia mengalami peningkatan, sehingga permintaan terhadap pasar tenaga kerja juga akan meningkat. Berdasarkan penelitian sebelumnya “Penentuan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa 2013-2020” yang ditulis oleh Agus Yulianto menyebutkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa masih belum optimal dan harusnya pemerintah dapat menetapkan sasaran dengan tepat sehingga masalah ini dapat diselesaikan.

Tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya saja, namun juga dari sumber daya manusianya yang dapat digambarkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM memperhitungkan ukuran-ukuran komparatif, termasuk angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup yang dapat diterima, yang dinyatakan dalam daya beli. Tolak ukur untuk mendapatkan kesempatan dalam bekerja yang baik adalah dengan melihat kualitas tenaganya. Jika ketiga aspek yang sudah disebutkan tadi dapat terpenuhi maka peningkatan kualitas produktif kerja dapat meningkat. Jika IPM meningkat, tentunya dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dalam mengukur tingkat penyerapan yang ada di dalam suatu daerah, dapat dilihat dari berapa banyaknya jumlah angkatan kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan dan bekerja. Dalam mempekerjakan tenaga kerja yang produktif, maka upah juga akan lebih dipertimbangkan dalam hal ini. Upah adalah aspek yang sangat penting untuk para pengusaha dan para tenaga kerja. Pekerja beranggapan bahwa upah adalah penghasilan yang digunakan untuk mencukupi kehidupannya, sedangkan pengusaha beranggapan bahwa upah adalah biaya yang harus dipenuhi dalam menghasilkan suatu barang.

Wilayah Jawa Timur sendiri masih mempunyai permasalahan dalam hal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika dilihat pada tahun 2021, produk domestik bruto Jatim meningkat, namun tingkat penyerapan tenaga kerja juga mengalami penurunan pada tahun yang sama. Selain itu, IPM Jatim meningkat pada tahun

2021, namun serapan tenaga kerja menurun. Perusahaan khawatir kenaikan gaji tahunan akan memberikan beban berat bagi perusahaan sehingga berdampak pada lapangan kerja. Terlihat dari penjelasan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan juga menganalisis dampak Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Bruto (PDRB) dan upah Jawa Timur terhadap penentuan angkatan kerja. Studi ini mengkaji beberapa variabel dan parameter untuk mengevaluasi hubungan antara IPM, PDRB dan upah di Jawa Timur dalam menentukan atau mengalokasikan angkatan kerja. Hal ini mungkin melibatkan analisis statistik, pemodelan matematis, atau pendekatan lain untuk mengukur sejauh mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kuantitas dan kualitas pekerjaan di Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini yang difokuskan pada analisis dan presentasi informasi terkait tenaga kerja di Jawa Timur. Data yang menjadi landasan utama penelitian berasal dari studi literatur serta data *time series* yang diterbitkan oleh BPS Jawa Timur pada periode 2018-2022. Dalam pendekatan deskriptif ini, penelitian mendalam pada karakteristik, tren, dan variasi data terkait jenis pekerjaan, tingkat upah, pendidikan, pengalaman kerja, dan distribusi geografis dari tenaga kerja di wilayah tersebut. Tujuannya adalah untuk merangkum informasi, mengidentifikasi pola umum, serta menyoroti perbedaan dan kesamaan dalam populasi tenaga kerja di Jawa Timur selama rentang waktu yang diteliti. Fokus penelitian lebih pada analisis dan penyajian data yang ada, tanpa memanipulasi variabel atau mengubah kondisi, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih holistik tentang situasi tenaga kerja di Jawa Timur pada periode tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di provinsi Jawa Timur selama rentang waktu dari tahun 2018 hingga 2022. Fokusnya adalah pada analisis terhadap data tenaga kerja yang meliputi berbagai sektor ekonomi, tingkat upah, pendidikan, pengalaman kerja, serta keragaman geografis di wilayah tersebut. Dalam kurun waktu tersebut, informasi yang diperoleh dan diteliti mencakup rentang tahun yang luas, memungkinkan pemahaman mendalam mengenai dinamika dan karakteristik tenaga kerja di Jawa Timur. Populasi dalam konteks penelitian ialah keseluruhan kelompok individu atau unit dengan karakteristik tertentu yang menjadi fokus dari penelitian. Pada kasus ini, populasi merujuk pada semua tenaga kerja yang ada di Jawa Timur selama periode 2018-2022. Ini mencakup berbagai jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, sektor ekonomi, tingkat upah, pengalaman kerja, dan variasi geografis yang ada di wilayah tersebut selama rentang waktu tersebut. Di sisi lain, sampel ialah bagian kecil dari populasi yang dipilih kemudian dianalisis atau diteliti secara lebih mendalam. Sampel ini dipilih untuk mewakili keragaman dan variasi yang ada di dalam populasi. Jadi, dalam konteks penelitian sampel akan terdiri dari sejumlah individu atau unit yang dipilih dari populasi tenaga kerja di Jawa Timur. Sampel penelitian diambil dengan metode acak, stratifikasi, atau dengan memilih

sub kelompok yang merepresentasikan variasi yang ada di populasi untuk memastikan representasi yang optimal.

Pada penelitian menggunakan dua teknik utama dalam pengumpulan data yang diperlukan. Teknik dominan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini ialah melalui studi literatur. Proses ini melibatkan serangkaian langkah, dimulai dari identifikasi sumber-sumber yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, tesis, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan karakteristik tenaga kerja, perubahan kebijakan, tren ekonomi, serta faktor-faktor lain yang berhubungan dengan kondisi tenaga kerja di Jawa Timur. Setelah identifikasi, dilakukan seleksi terhadap informasi yang paling relevan dan berkualitas tinggi. Kemudian, dilakukan analisis mendalam terhadap setiap sumber literatur yang terpilih, mencatat temuan kunci, metodologi penelitian yang digunakan, dan hasil utama untuk sintesis informasi yang holistik. Selain studi literatur, sumber data lain yang menjadi fundamental dalam penelitian ialah data *time series* yang bersumber dari BPS Jawa Timur selama periode 2018 hingga 2022. Data *time series* ini mencakup berbagai statistik terkait ekonomi, demografi, tenaga kerja, dan indikator lain yang relevan dengan tujuan penelitian. Data ini memberikan kesempatan untuk menganalisis tren, perubahan, dan dinamika yang terjadi dalam kurun waktu tersebut.

Dalam proses analisis data penelitian ini, penggunaan metode statistik deskriptif menjadi landasan utama untuk merangkum dan menggambarkan informasi yang terkandung dalam data sekunder dan literatur yang dikumpulkan. Teknik ini memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam terkait dengan karakteristik, variabilitas, dan tren yang ada dalam informasi yang telah terhimpun. Metode statistik deskriptif ini melibatkan serangkaian perhitungan statistik yang bertujuan untuk menggambarkan distribusi data. Beberapa di antaranya meliputi perhitungan rata-rata, median, dan modus, yang memberikan gambaran tentang pusat sebaran data serta nilai yang paling sering muncul. Selain itu, perhitungan deviasi standar dan rentang data digunakan untuk menunjukkan sebaran atau variasi data di sekitar nilai rata-rata. Proses analisis ini tidak hanya terbatas pada perhitungan statistik dasar. Di samping itu, teknik analisis yang lebih lanjut mungkin juga melibatkan pembuatan grafik, diagram, atau visualisasi lainnya untuk mempresentasikan data secara lebih jelas dan mudah dipahami. Ini dapat membantu dalam mengidentifikasi pola, tren, atau perbedaan yang mungkin tersembunyi di dalam data. Melalui penerapan metode statistik deskriptif ini, penelitian dapat mengeksplorasi informasi yang ada dengan lebih detail, memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi tenaga kerja di Jawa Timur. Hal ini juga memungkinkan penyajian data yang lebih terstruktur dan bermakna, yang dapat menjadi dasar untuk kesimpulan yang lebih kuat dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi instrumen krusial dalam mengevaluasi progres pembangunan suatu wilayah. IPM bukan hanya mencerminkan pencapaian masa lalu, melainkan juga menjadi gambaran arah pembangunan pada periode mendatang. Sebelum era 1970-an, keberhasilan pembangunan sering diukur melalui indikator pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Meskipun hal ini berhasil dicapai di berbagai negara berkembang, seperti Indonesia, kenyataannya, kemajuan tersebut tidak selalu tercermin dalam peningkatan kualitas hidup atau kesejahteraan masyarakat. Perubahan paradigma muncul ketika para pakar menyadari bahwa pembangunan yang sukses tidak boleh hanya ditandai oleh angka pertumbuhan ekonomi semata, melainkan harus melibatkan peningkatan kualitas manusia secara keseluruhan. Konsep ini menekankan bahwa evaluasi pembangunan seharusnya melibatkan faktor-faktor seperti akses pendidikan, kesehatan, standar hidup yang layak, dan aspek-aspek sosial lainnya. Tantangan yang muncul kini adalah bagaimana memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat memberikan dampak nyata dalam peningkatan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan bukan hanya berfokus pada pencapaian ekonomi semata, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, menekankan pada aspek-aspek yang membentuk manusia secara lebih baik, lebih sehat, dan lebih terdidik.

Peningkatan kemampuan manusia dalam hal kesenangan, produktivitas, serta partisipasi dalam berbagai aktivitas budaya, sosial, dan politik adalah bagian integral dari pembangunan manusia. Untuk mencapai kesejahteraan yang seimbang, pembangunan manusia harus memperhatikan aspek-aspek ini. Oleh karena itu, manusia bukan hanya sebagai pelaku tetapi juga sebagai bahan utama dalam proses pembangunan. Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bisa mencerminkan keberhasilan suatu program – program pembangunan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Namun, perlu diingat bahwa perubahan atau peningkatan IPM bukanlah sesuatu yang dapat terjadi secara cepat. Pembangunan manusia adalah proses yang memerlukan waktu dan tidak dapat diukur secara instan. Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi yang dapat terlihat dalam waktu singkat, dampak dari pembangunan dalam bidang pendidikan dan kesehatan memerlukan waktu yang lebih panjang untuk dapat terlihat secara jelas.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan Indeks Pembangunan Manusia ke dalam empat klasifikasi atau segmen, yaitu: IPM rendah (kurang dari 60), IPM sedang (antara 60 hingga kurang dari 70), IPM tinggi (antara 70 hingga kurang dari 80), dan IPM sangat tinggi (80 atau lebih). Ketidakmerataan pembangunan di Indonesia menyebabkan adanya variasi yang signifikan dalam tingkat Indeks Pembangunan Manusia di berbagai wilayah, terutama di tingkat kabupaten/kota. Wilayah-wilayah dengan IPM tinggi hingga sangat tinggi cenderung terkonsentrasi di kabupaten/kota yang lebih besar di Indonesia. Faktor penyebabnya adalah karena adanya ketersediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan yang lebih optimal di wilayah perkotaan dan kabupaten yang lebih besar.

Tabel 1. Klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia

Nilai Indeks Pembangunan Manusia	Status Pembangunan Manusia
< 60	Rendah
$60 \leq IPM < 70$	Sedang
$70 \leq IPM < 80$	Tinggi
≥ 80	Sangat Tinggi

Sumber : Badan Pusat Statistik, Klasifikasi IPM

Skala klasifikasi ini dapat bervariasi tergantung pada metodologi atau indeks yang digunakan untuk mengukur IPM. Badan-badan statistik seperti PBB melalui Program Pembangunan PBB (UNDP) sering kali merilis laporan yang memperlihatkan klasifikasi IPM berdasarkan negara atau wilayah, memberikan gambaran secara global tentang tingkat pembangunan manusia di seluruh dunia.

Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Sampang	61.00	61.94	62.70	62.8	63.39
Kota Malang	80.89	81.32	81.45	82.04	82.71
Kota Surabaya	81.74	82.22	82.23	82.31	82.74
Jawa Timur	70.77	71.50	71.71	72.14	72.75

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2018 - 2022

Pembangunan manusia di Jawa Timur mengalami peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun, tercermin dari pertumbuhan yang terus-menerus dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM tidak hanya memerhatikan satu aspek saja, melainkan melihat hubungan yang lebih luas antara dimensi sosial dan ekonomi di Jawa Timur. Pada tahun 2022, IPM Jawa Timur mencapai 72,75%, naik dari angka 70,77% pada tahun 2018. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan semua faktor pembentuk IPM, termasuk kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pemerintah provinsi perlu upaya lebih besar lagi untuk terus meningkatkan capaian masing-masing indikator pembentuk IPM kabupaten/kota yang masih berada di bawah rata-rata Jawa Timur. Sebagaimana tahun sebelumnya, Jawa Timur tetap menempati peringkat 15 setelah Sulawesi Selatan 70,90% dan Jawa Tengah 70,77%. Meskipun Jawa Timur sudah termasuk pembangunan manusia kategori “tinggi”. Namun hal menarik di tahun 2018 adalah pembangunan manusia di Jawa Timur paling rendah sudah berkategori “sedang”. Kabupaten Sampang yang sebelumnya masuk kategori “rendah” akhirnya naik kelas menjadi kategori “sedang”. IPM Sampang tahun 2018 mencapai 61,00 poin. Meningkatnya status pembangunan manusia Kabupaten Sampang tahun 2018

setidaknya mengindikasikan bahwa pembangunan manusia Jawa Timur lebih baik Surabaya memiliki IPM tertinggi di Jawa Timur, yaitu 81,74% diikuti oleh Kota Malang dengan IPM 80,94%. Meskipun Kabupaten Sampang naik kelas ke kategori "sedang", IPM-nya masih menempati posisi terendah di antara wilayah lainnya, menjadi fokus utama dalam peningkatan IPM Jawa Timur secara keseluruhan.

Hubungan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, usaha untuk meningkatkan pilihan dan peluang individu adalah inti dari konsep pembangunan manusia yang dinyatakan dalam laporan UNDP. Konsep ini menempatkan penduduk sebagai fokus utama, sementara upaya pembangunan dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut (Nurul Izzah, 2015). Kemunculan kemiskinan dalam suatu masyarakat sering kali disebabkan oleh kurangnya "kapasitas daya" manusia. Penilaian terhadap kualitas sumber daya manusia sering dilakukan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Produktivitas tenaga kerja yang rendah secara langsung terhubung dengan tingkat IPM yang rendah. Pendapatan yang rendah sering kali disebabkan oleh kurangnya produktivitas tenaga kerja. Keterbatasan dalam menghasilkan pendapatan yang memadai juga berkorelasi dengan jumlah penduduk yang hidup dalam kondisi miskin (Sukmaraga, 2011). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusuf pada tahun 2016 menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dan berkebalikan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan tingkat pengangguran. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi IPM suatu wilayah, semakin rendah tingkat pengangguran yang terjadi. Sebaliknya, apabila IPM rendah, hal tersebut dapat berkontribusi pada peningkatan tingkat pengangguran di wilayah tersebut. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa rendahnya IPM memiliki dampak negatif terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur memiliki hubungan yang erat dengan penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut. Tingkat IPM yang tinggi biasanya menunjukkan adanya akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan yang memadai, dan standar hidup yang lebih baik bagi penduduk Jawa Timur. Ini dapat memiliki dampak positif terhadap kualifikasi, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja di wilayah tersebut.

Ketika IPM Jawa Timur tinggi, masyarakatnya cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik, sehingga mereka lebih mungkin untuk memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam pasar kerja yang berkembang. Selain itu, akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan juga berkontribusi pada kesejahteraan fisik dan mental penduduk, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan kehadiran tenaga kerja. Di sisi lain, jika IPM Jawa Timur rendah, ada kemungkinan bahwa kualifikasi penduduknya akan terpengaruh, dan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dengan keterampilan yang ada mungkin menjadi terbatas. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk menyerap tenaga kerja yang ada dan meningkatkan angka pengangguran atau *underemployment* di wilayah tersebut. Artinya, ketika indeks pembangunan manusia rendah, kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan menjadi tidak optimal atau tidak mencukupi untuk menampung tenaga kerja yang ada.

Dengan demikian, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur secara umum dapat mendukung peningkatan penyerapan tenaga kerja dengan meningkatkan kualifikasi, keterampilan, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan peluang kerja yang lebih baik bagi penduduknya.

Upah adalah imbalan finansial atau kompensasi yang diberikan kepada pekerja sebagai imbalan atas jasa atau pekerjaan mereka. Upah dapat diukur dalam berbagai bentuk, termasuk uang tunai, gaji bulanan, atau bentuk lain seperti tunjangan, bonus, atau fasilitas lainnya. Tingkat upah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat pendidikan dan keterampilan pekerja, pengalaman kerja, sektor industri tempat mereka bekerja, serta kondisi ekonomi dan peraturan pemerintah di suatu wilayah. Faktor utama dalam menentukan tingkat upah adalah dengan mempertimbangkan nilai dan kontribusi pekerja terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Pendidikan yang lebih tinggi, keahlian khusus, dan pengalaman kerja yang lama dapat menjadi faktor penentu kenaikan upah. Pemerintah sering melakukan intervensi dalam menetapkan upah minimum untuk melindungi pekerja dari eksploitasi dan memastikan standar hidup yang layak. Negosiasi antara pekerja dan pemberi kerja juga memainkan peran penting dalam menentukan tingkat upah, dan kondisi pasar tenaga kerja seperti tingkat pengangguran dan permintaan tenaga kerja dapat mempengaruhi dinamika ini. Kesepakatan upah biasanya mencerminkan kompromi antara kebutuhan pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keberlanjutan keuangan perusahaan. Sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia memainkan peran penting dalam merancang kebijakan pengupahan yang adil dan berkelanjutan untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Perubahan upah setiap tahunnya disebabkan oleh sejumlah faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan yang dapat mempengaruhi nilai upah dan kondisi pasar tenaga kerja. Beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan perubahan upah secara tahunan melibatkan dinamika kompleks dalam suatu perekonomian. Mulai dari inflasi, pertumbuhan penduduk, kebijakan pemerintah maupun pengangguran. Penting untuk diingat bahwa perubahan upah bukanlah hasil tunggal dari satu faktor, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang kompleks. Perubahan upah provinsi di Jawa Timur tahun 2018-2022 dapat dikatakan naik menurut data di bawah ini menjelaskan kenaikan upah di Provinsi Jawa Timur di tiap tahunnya.

Tabel 3. Tingkat Upah Minimum di Jawa Timur

Kabupaten/ Kota Se Jawa Timur	Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Sampang	1.632.201,84	1.763.267,65	1.913.321,73	1.938.321,73	1.922.122,97
Kota Malang	2.470.073,29	2.668.420,18	2.895.502,74	2.970.502,73	2.994.143,98

Kota Surabaya	3.583.312,61	3.871.052,61	4.200.479,19	4.300.479,19	4.375.479,19
Jawa Timur	1.508.894,80	1.630.059,05	1.768.777	1.868.777,08	1.891.567,12

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2018 – 2022

Dari data di atas, menunjukkan bahwa di Kabupaten Sampang memiliki Upah Minimum Provinsi terendah dibandingkan Kota/Kabupaten lainnya, yaitu sebesar Rp 1.992.122,97 pada tahun 2022. Kota Surabaya memiliki Upah Minimum Provinsi tertinggi di Jawa Timur pada tahun 2022. Dan UMP Jawa Timur memiliki rata-rata sebesar Rp 1.508.894,80. Meskipun kenaikan dalam jumlah mutlak relatif kecil, namun ada kecenderungan bahwa indeks upah terus meningkat setiap tahun, menunjukkan stabilitas dalam pertumbuhan upah. Mulai dari Sosial dan Ekonomi karena Peningkatan indeks upah dapat memiliki dampak signifikan pada tingkat kesejahteraan pekerja dan kontribusi terhadap ekonomi lokal. Perubahan ini juga bisa mempengaruhi biaya hidup dan daya beli masyarakat.

Hubungan Upah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, setiap tingkat upah pada kenyataannya tidak akan pernah adaptif dan cenderung terus menurun, hal ini dipengaruhi oleh harga-harga komoditi yang cenderung naik setiap tahunnya. Bagi pengusaha, kelancaran upah dapat dikatakan sebagai dasar atau pengaruh bagi kelancaran perusahaan. Tingkat upah yang tinggi berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja, karena upah yang tinggi memberi semangat dan motivasi kepada pekerja, dan pekerja beserta keluarganya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Pengusaha dapat memberikan insentif kepada para pekerja agar dapat bekerja dengan baik dengan memberikan upah yang sebanding atau sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya dan disepakati oleh kedua belah pihak, dan akibatnya produktivitas dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Menurut teori David Ricardo, tingkat upah yang dibayarkan kepada pekerja tergantung pada apa yang pekerja dan keluarganya keluarkan untuk bertahan hidup, dan tingkat upah ditentukan oleh kapasitas perusahaan. Upah yang lebih tinggi menjamin kesejahteraan pekerja dan keluarganya dan meningkatkan efektivitas penawaran tenaga kerja. Ketika ada surplus tenaga kerja, maka upah akan cenderung turun. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan tenaga kerja dan berarti bahwa kenaikan upah meningkatkan biaya unit perusahaan. Biasanya, konsumen bereaksi cepat terhadap kenaikan harga komoditas dengan mengurangi konsumsi. Akibatnya, banyak barang yang tidak terjual dan produsen terpaksa mengurangi produksi. Pengurangan produksi menyebabkan pengurangan jumlah tenaga kerja dan pengusaha mengganti barang modal seperti mesin dengan tenaga kerja. Pengurangan permintaan tenaga kerja karena substitusi atau penambahan penggunaan mesin disebut efek substitusi.

Efek upah juga sangat penting bagi penggunaan tenaga kerja, jika sistem upah adil dan wajar bagi pekerja dalam suatu industri maka produktivitas tenaga kerja akan

semakin tinggi dan akibatnya produksi barang akan meningkat. Rizal (2014) berpendapat bahwa peningkatan nilai upah dapat meningkatkan harkat dan martabat hidup pekerja, namun jika kenaikan upah terlalu besar dan tidak menyebabkan peningkatan produktivitas tenaga kerja maka perusahaan akan mengurangi penggunaan tenaga kerja dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerja. Hal ini dikarenakan beban tenaga kerja yang terlalu tinggi. Korelasi antara tingkat upah dan penyerapan tenaga kerja adalah positif.

Ketika tingkat upah rendah, hal ini menunjukkan bahwa setiap perubahan upah memiliki dampak yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja, tetapi dalam penelitian ini, tingkat upah memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, yaitu penyerapan tenaga kerja menurun ketika tingkat upah meningkat. Permintaan tenaga kerja merupakan fungsi dari tingkat upah. Ukuran dan fungsi permintaan dari setiap perusahaan tergantung pada ukuran perusahaan atau sektor, jenis kegiatan, penggunaan teknologi dan keterampilan manajemen pengusaha. Karena biaya tenaga kerja perusahaan merupakan biaya produksi, maka kenaikan biaya tenaga kerja akan mengurangi keuntungan perusahaan. Untuk memaksimalkan laba, perusahaan harus mengoptimalkan alat produksi dan meminimalkan biaya. Kenaikan upah berarti kenaikan biaya produksi dan mempengaruhi permintaan tenaga kerja.

Upah memainkan peran sentral dalam penyerapan tenaga kerja di suatu perekonomian, dan pengaruhnya dapat mempengaruhi beberapa aspek dalam pasar tenaga kerja. Tingkat upah dapat mempengaruhi motivasi pekerja, keputusan perusahaan dalam merekrut dan mempertahankan pekerja, serta distribusi pendapatan di masyarakat. Tingkat upah yang kompetitif dapat meningkatkan motivasi pekerja untuk bergabung atau tetap bekerja dalam suatu sektor atau industri. Upah yang menarik dapat menjadi insentif yang kuat untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja berkualitas, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Dalam hal penyerapan tenaga kerja, tingkat upah juga mempengaruhi keputusan perusahaan terkait dengan skala produksi dan perekrutan pekerja. Upah yang relatif rendah dapat mendorong perusahaan untuk memperluas produksi atau menambah jumlah pekerja untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Sebaliknya, upah yang tinggi dapat mendorong perusahaan untuk mengotomatisasi atau mempertimbangkan strategi lain untuk mengurangi biaya tenaga kerja. Tingkat upah juga dapat mempengaruhi tingkat pengangguran. Jika upah diatur sangat tinggi, perusahaan mungkin kurang bersedia merekrut lebih banyak pekerja atau malah melakukan pemotongan tenaga kerja untuk mengurangi biaya. Sebaliknya, upah yang terlalu rendah dapat menciptakan masalah ketidakpuasan dan penolakan pekerja untuk bekerja dalam kondisi upah yang tidak memadai.

Selain itu, ketidaksetaraan upah antar industri atau sektor ekonomi dapat memengaruhi distribusi pendapatan secara keseluruhan. Jika beberapa sektor membayar upah yang jauh lebih tinggi daripada sektor lain, ini dapat menyebabkan

ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, kebijakan terkait upah, seperti penetapan upah minimum, dapat berdampak langsung pada tingkat penyerapan tenaga kerja dan distribusi pendapatan. Dalam keseluruhan, hubungan antara upah dan penyerapan tenaga kerja sangat kompleks dan melibatkan faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, produktivitas, dan dinamika pasar tenaga kerja. Penetapan upah yang bijak dan seimbang dapat membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang mendukung penyerapan tenaga kerja yang optimal dan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama dalam mengukur aktivitas ekonomi suatu wilayah atau daerah. PDRB mencakup nilai total semua barang dan jasa yang diproduksi dalam batas-batas geografis suatu wilayah, yang memberikan gambaran kontribusi ekonomi wilayah tersebut terhadap perekonomian nasional. PDRB dapat dilihat dari dua perspektif: dasar harga berlaku, yang mencerminkan nilai ekonomi aktual pada harga pasar saat ini, dan dasar harga konstan, yang disesuaikan dengan perubahan harga untuk memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya. Dengan demikian, PDRB tidak hanya mencatat nilai *output* dari sektor industri, tetapi juga mencakup sektor pertanian, jasa, dan sektor ekonomi lainnya, sehingga memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai struktur ekonomi regional. PDRB memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan pemerintah dan perencanaan ekonomi. Pemerintah daerah dan pusat menggunakan data PDRB untuk merancang kebijakan ekonomi, alokasi anggaran, dan pembangunan infrastruktur. Analisis PDRB juga membantu mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang mendorong pertumbuhan, serta sektor-sektor yang mungkin memerlukan dukungan atau restrukturisasi. Selain itu, bagi para pelaku bisnis dan investor, data PDRB memberikan wawasan strategis untuk memahami potensi pasar dan peluang investasi di suatu wilayah.

Penting untuk dicatat bahwa PDRB bukan hanya sekedar angka statistik, tetapi merupakan cerminan dinamika ekonomi daerah yang dapat membantu mengukur kesejahteraan masyarakat dan memberikan landasan bagi pengambilan keputusan yang berkelanjutan. Analisis PDRB yang menyeluruh dapat mendukung perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi adalah suatu usaha yang dilakukan melalui berbagai kebijakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat dan memperbaiki hubungan ekonomi regional. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah melalui kegiatan ekonomi dalam jangka waktu tertentu, tanpa memperhatikan apakah faktor-faktor produksi yang digunakan dimiliki oleh penduduk wilayah tersebut.

Tabel 4. PDRB di Jawa Timur

Kabupaten/Kota	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota Jawa Timur (Miliar Rupiah)				
	2022	2021	2020	2019	2018
Kab. Sampang	14.308,3	13.984,6	13.953,7	13.994,8	13.741,0
Kota Malang	56.678,6	53.309,7	51.154,5	52.334,8	49.500,8
Kota Surabaya	434.268,3	407.725,8	390.936,4	410.879,3	387.303,9
Jawa Timur	1.757.821,4	1.668.749,4	1.611.392,6	1.649.895,6	1.563.441,8

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2018 - 2022

PDRB Jawa Timur mengalami pertumbuhan selama periode 2018-2022. Tren pertumbuhan ini menunjukkan bahwa ekonomi provinsi tersebut telah mengalami perkembangan positif selama beberapa tahun terakhir. Analisis kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB dapat memberikan wawasan tentang sektor mana yang memiliki dampak signifikan. Ini bisa melibatkan sektor pertanian, industri, dan jasa. faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selama periode tersebut, seperti investasi, kebijakan pemerintah, atau perkembangan industri. pertumbuhan PDRB Jawa Timur dengan rata-rata nasional dapat memberikan gambaran tentang apakah provinsi tersebut mengalami pertumbuhan di atas atau di bawah rata-rata nasional. Menilai dampak pertumbuhan ekonomi pada kesejahteraan masyarakat, termasuk dampaknya pada tingkat pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Penting untuk diingat bahwa analisis ini bersifat umum dan tidak mencakup aspek-aspek seperti inflasi, pengangguran, atau ketidaksetaraan ekonomi.

Namun, PDRB di Jawa Timur belum merata di setiap Kota/kabupatennya. Bisa dilihat dari data di atas, Kabupaten Sampang memiliki PDRB yang selisihnya cukup jauh dibandingkan dengan Kota Malang dan Kota Surabaya. Kabupaten Sampang dari tahun ke tahun memiliki PDRB cenderung meningkat, namun angkanya masih jauh tertinggal dibandingkan Kota Malang dan Kota Surabaya. Kota Malang memiliki PDRB yang cenderung meningkat juga dari tahun-tahun sebelumnya. Kota Surabaya memiliki PDRB yang sangat tinggi dan unggul, yaitu sebesar 434.286,3 pada bulan 2023, dan meningkat signifikan dari tahun sebelum-sebelumnya. Industri potensial yang dapat diandalkan oleh Surabaya selama periode analisis 2018-2022 adalah perdagangan besar dan eceran, manufaktur, akomodasi dan jasa makanan, konstruksi, otomotif dan reparasi mobil, serta telekomunikasi, yang merupakan sumber pendapatan prioritas bagi Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa Surabaya merupakan basis ekonomi Jawa Timur, di mana industri utamanya adalah perdagangan besar dan eceran.

Hubungan PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, di Indonesia, pertumbuhan populasi yang tinggi berpotensi meningkatkan jumlah penduduk di berbagai wilayahnya. Ini mengindikasikan kebutuhan akan lapangan pekerjaan yang lebih besar sesuai dengan pertumbuhan penduduk. Namun, jika pertumbuhan ekonomi tidak mampu menampung jumlah tenaga kerja yang terus bertambah, hal ini dapat menyebabkan masalah pengangguran yang serius di negara tersebut. Kemakmuran suatu negara sering diukur dari pencapaian pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kuat menandakan peningkatan dalam hal kesejahteraan ekonomi. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang negatif dapat mengakibatkan penurunan kemakmuran dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi memainkan peran kunci dalam konteks ekonomi suatu negara, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Pembangunan ekonomi dianggap sebagai sarana utama untuk mencapai tujuan nasional, yang sering diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB).

PDRB, yang merupakan nilai total tambah dari segala aktivitas produksi dalam suatu wilayah, memengaruhi partisipasi tenaga kerja karena nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor dalam suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Peningkatan nilai PDRB memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan lapangan kerja di wilayah tersebut melalui peningkatan aktivitas ekonomi. Provinsi Jawa Timur, yang berkontribusi besar terhadap PDRB nasional, memiliki keterkaitan erat antara PDRB dan penyerapan tenaga kerja dengan pertumbuhan ekonomi serta struktur sektor ekonomi. Kenaikan PDRB di Jawa Timur sering kali mencerminkan pertumbuhan positif di sektor-sektor seperti pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dan layanan lainnya, yang membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk memenuhi permintaan produksi yang meningkat. Namun, penting untuk dicatat bahwa penyerapan tenaga kerja tidak hanya tergantung pada pertumbuhan PDRB. Faktor-faktor lain seperti pendidikan, keterampilan, kebijakan ketenagakerjaan, teknologi, dan efisiensi produksi juga memengaruhi kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas. Di Jawa Timur, upaya meningkatkan keterampilan tenaga kerja, mendukung inovasi, sektor-sektor yang berkembang, dan penerapan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dapat berperan dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Permasalahan ketenagakerjaan di Jawa Timur pada periode 2018-2022 disebabkan oleh ketidakmerataan sistem pencarian kerja. Dampaknya adalah peningkatan jumlah tenaga kerja yang semakin besar, menyebabkan peningkatan pencari kerja dan pengangguran. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Bruto (PDRB), dan Upah Jawa Timur dalam determinasi tenaga kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM yang tinggi dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, upah yang tinggi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, dan

peningkatan PDRB dapat membuka peluang penyerapan tenaga kerja. Selain itu, ketidakmerataan penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur masih menjadi persoalan, terutama terkait PDRB yang mengalami peningkatan tetapi penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi suatu instrumen penting dalam mengevaluasi progres pembangunan suatu wilayah. Seiring dengan perubahan paradigma sejak era 1970-an, evaluasi pembangunan tidak lagi hanya ditandai oleh pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga melibatkan peningkatan kualitas manusia secara keseluruhan. IPM mencakup aspek-aspek seperti akses pendidikan, kesehatan, standar hidup yang layak, dan aspek sosial lainnya. Pembangunan manusia di Jawa Timur, yang tercermin dalam peningkatan IPM dari tahun 2018 (70,77%) hingga 2022 (72,75%), menunjukkan progres positif. Meskipun demikian tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan dampak nyata pada peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat. Pembangunan manusia bukanlah proses instan dan peningkatan IPM memerlukan upaya berkelanjutan. Beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur masih memiliki IPM di bawah rata-rata provinsi, menunjukkan ketidakmerataan pembangunan. Pemerintah perlu melakukan upaya lebih besar untuk meningkatkan indikator pembentuk IPM di wilayah-wilayah tersebut. Meskipun Jawa Timur termasuk dalam kategori "tinggi," perlu diakui bahwa capaian tersebut masih dapat ditingkatkan, terutama untuk kabupaten/kota yang masih memiliki IPM di kategori "sedang."

Dalam konteks penyerapan tenaga kerja, hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia dan tingkat pengangguran di Jawa Timur menggambarkan bahwa semakin tinggi IPM suatu wilayah, semakin rendah tingkat pengangguran yang terjadi. Ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas manusia untuk mendukung kesempatan kerja. Tingginya tingkat IPM juga berdampak positif pada kualifikasi, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja di wilayah tersebut. Pertimbangan terhadap upah juga merupakan aspek penting dalam hubungan antara pembangunan manusia dan penyerapan tenaga kerja. Upah yang setimpal dengan pekerjaan dapat memberikan motivasi bagi tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Namun, perlu diwaspadai bahwa upah yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi keputusan perusahaan terkait perekrutan dan penyerapan tenaga kerja, mengingat upah adalah salah satu faktor biaya produksi.

Ketika melibatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur selama periode 2018-2022 mencerminkan kemajuan positif. PDRB yang meningkat dapat memberikan dampak positif pada penyerapan tenaga kerja, terutama jika pertumbuhan ekonomi diiringi oleh diversifikasi sektor dan peningkatan nilai tambah. Dalam konteks penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan PDRB juga berperan penting. Peningkatan PDRB dapat merangsang pertumbuhan nilai tambah dari penjualan produk-produk di berbagai sektor ekonomi yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja baru. Namun,

perlu diperhatikan bahwa pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja tidak bersifat linear dan memerlukan strategi kebijakan yang bijak. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang karakteristik, tren, dan variasi tenaga kerja di Jawa Timur. Secara keseluruhan, hubungan antara pembangunan manusia, upah, PDRB, dan penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur terbilang kompleks. Keberhasilan pembangunan manusia yang mencakup peningkatan IPM, kebijakan upah yang seimbang, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat memberikan kontribusi positif pada penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Akan tetapi, perlu perhatian lebih terhadap ketidakmerataan penyerapan tenaga kerja di beberapa sektor. Langkah-langkah kebijakan yang tepat perlu diambil untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Jawa Timur agar dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada hasil penelitian didapati bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator krusial dalam mengevaluasi progres pembangunan suatu wilayah. Di Jawa Timur, peningkatan IPM dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan perkembangan positif dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran per kapita. Namun, perlu diakui bahwa perubahan dalam IPM memerlukan waktu dan merupakan hasil dari proses pembangunan manusia yang berkelanjutan. Penting untuk memahami bahwa pembangunan manusia tidak hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi semata. Evaluasi pembangunan seharusnya melibatkan faktor-faktor seperti akses pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan harus mengintegrasikan aspek-aspek yang membentuk manusia menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih terdidik

Dalam konteks penyerapan tenaga kerja, IPM Jawa Timur yang tinggi dapat dihubungkan dengan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan produktif. Namun, perlu diingat bahwa hubungan ini bersifat kompleks dan pembangunan manusia yang optimal harus diimbangi dengan kebijakan upah yang adil. Tingkat upah yang kompetitif dapat meningkatkan motivasi pekerja, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Upah sebagai imbalan finansial bagi pekerja, memainkan peran sentral dalam penyerapan tenaga kerja. Kenaikan upah yang seimbang dengan produktivitas dapat memberikan insentif kepada tenaga kerja untuk meningkatkan kinerja, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja yang optimal. Namun, perlu diwaspadai bahwa upah yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat berdampak negatif pada penyerapan tenaga kerja, pengangguran, dan keberlanjutan ekonomi regional.

PDRB Jawa Timur menjadi indikator utama aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Pertumbuhan PDRB yang positif dari tahun 2018 hingga 2022 mencerminkan kemajuan ekonomi provinsi. Namun, perlu diperhatikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum merata di seluruh Kota/Kabupaten, seperti terlihat dari

perbandingan PDRB antara Kabupaten Sampang, Kota Malang, dan Kota Surabaya. Dalam konteks hubungan PDRB dengan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi yang positif dapat memberikan dampak positif terhadap kesempatan kerja. Namun, hal ini harus didukung oleh kebijakan yang mendorong diversifikasi ekonomi, peningkatan produktivitas, dan pendidikan yang berkualitas. Pemerintah daerah perlu memperhatikan sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi dan mengembangkan strategi untuk mendukung penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor tersebut. Secara keseluruhan kebijakan pembangunan di Jawa Timur harus berfokus pada peningkatan kualitas manusia, pemberdayaan tenaga kerja melalui upah yang adil, dan dukungan terhadap sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi pertumbuhan. Dengan demikian, pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS JATIM. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota 2017-2019*. Diambil kembali dari [jatim.bps.go.id](https://jatim.bps.go.id/indicator/26/36/2/indeks-pembangunan-manusia-menurut-kecamatan-kota.html): <https://jatim.bps.go.id/indicator/26/36/2/indeks-pembangunan-manusia-menurut-kecamatan-kota.html>
- BPS JATIM. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Menurut Pengeluaran 2018-2022*. Diambil kembali dari jatim.bps.go.id: [atim.bps.go.id](https://jatim.bps.go.id)
- BPS JATIM. (2023, April 5). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur menurut Lapangan Usaha 2018-2022*. Diambil kembali dari jatim.bps.go.id/: <https://jatim.bps.go.id/publication/2023/04/05/efc2be28dd3b64c7b12f7c5a/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-jawa-timur-menurut-lapangan-usaha-2018-2022.html>
- BPS MALANG. (2023). *Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) dan Provinsi (UMP) di Jawa Timur (Rupiah (Rp.)), 2018-2020*. Retrieved from [malangkota.bps.go.id](https://malangkota.bps.go.id/indicator/19/529/2/upah-minimum-kabupaten-kota-umk-dan-provinsi-ump-di-jawa-timur.html): <https://malangkota.bps.go.id/indicator/19/529/2/upah-minimum-kabupaten-kota-umk-dan-provinsi-ump-di-jawa-timur.html>
- BPS PROBOLINGGO. (2023). *Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Rupiah), 2021-2023*. Diambil kembali dari [probolinggokab.bps.go.id](https://probolinggokab.bps.go.id/indicator/19/288/1/upah-minimum-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html): <https://probolinggokab.bps.go.id/indicator/19/288/1/upah-minimum-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html>

- Ferilio. (2021). Pengaruh Tingkat Upah Terhadap Permintaan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Menengah Menurut Pandangan Ekonomi Islam Di Kota Manna Bengkulu Selatan. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/>, 1-91.
- Izzah, N. (2015). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia (ipm) dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di propinsi Riau tahun 1994-2013. In *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*. scholar.archive.org. https://scholar.archive.org/work/v6oj5x5nr5dpbglqawhahly6l4/access/wayback/http://e-journal.perpustakaanstainpsp.net/index.php/at-tijarah/article/viewFile/103/pdf_18
- Pramono, K. D. (2022). Determinasi Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2020. *Jurnal Ekonomi Trisakti*. <https://trijurnal.trisakti.ac.id/index.php/jet/article/view/14436>
- Prayogo, I., & Hasmarini, M. I. (2022). Analisis Pengaruh IPM, Upah Minimum, PDRB Dan Jumlah Penduduk Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Yogyakarta Tahun 2018-2021. *SEIKO: Journal of Management & ...*. <https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/3046>
- Putri, N. A., & Soelistyo, A. (2018). Analisis Pengaruh Upah, Pdrb, Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dikawasan Gerbangkertasusila Tahun 2012-2016. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/view/7095>
- Safira, T. A. (2022). *Data UMP Jawa Timur Selama Lima Tahun Terakhir, 2018 hingga 2022, Tertinggi UMK di Kota Surabaya*. Diambil kembali dari www.tribunnews.com:
- Safitri, A. W., & Desmintari, D. (2022). *Determinan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur*. ejournal.upnvj.ac.id. <https://ejournal.upnvj.ac.id/jded/article/view/5365>
- Sari, T. K. (2017). *Determinan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2007-2016*. dspace.uui.ac.id. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/5362>
- Setyoawati, W. R., & Anas, M. (2022). *Determinan Permintaan Tenaga Kerja Di Jawa Tengah Tahun 2017-2020*. eprints.ums.ac.id. <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/97492>
- Tarman, M., Ruski, R., Purnomo, I. A., & ... (2022). Pengaruh Pdrb Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia. *Equilibria ...*. <http://journal.upgris.ac.id/index.php/equilibriapendidikan/article/view/1394>